



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 225 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI PUSAT  
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkup Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja dan mempersiapkan serta melaksanakan proses/tahapan-tahapan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. menyiapkan dokumen/bukti-bukti yang diperlukan terkait pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi/unit organisasi terkait, pemantauan dan evaluasi, dan melakukan pengawasan untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkup Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi atau unit organisasi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 259 Tahun 2023 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Unit Organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti  


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)  
PADA UNIT ORGANISASI PUSAT  
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PENGADAAN BARANG/JASA.

NOMOR : 225 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Juli 2024

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA UNIT ORGANISASI  
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama/Jabatan</b>
Pengarah	:	1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Ketua	:	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Koordinator	:	Vina Da'watul Aropah
Manajemen Perubahan	:	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
Anggota		1. Wildan Massani
		2. Budi Bowo Laksono
		3. Yosi Febriani
		4. Wahyu Eko Saputro
		5. Gracetiara Meradiviani
Penataan Tata Laksana	:	Satriyo Wibowo
Anggota		1. Yoga Nurdani

		2. Hery Fadhly Zulni
		3. Nurkaidah
		4. Ahmad Fauzi
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	:	Rizky Arimawati
Anggota		1. Dwi Kartika Susanti
		2. Didin Rusyad Nurdin
		3. Kresna Aditama
		4. Abdul Hasbi
Penguatan Akuntabilitas	:	Ketsia Aprilianny Laya
Anggota		1. Arif Rachman
		2. Elis Elsani
		3. Setiaji Santoso
		4. Silmi Sudrajat Putri
Penguatan Pengawasan	:	Tri Susanto
Anggota		1. Henky Rizky Widiardi
		2. Erika Novitasari
		3. Rieska Fajarmawati
		4. Arum Kurniawati
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	Tino Yuka Aldila
Anggota		1. Winny Adlina Pratomo
		2. Ester Dwi Sartika
		3. Lutfi Ramadhan
		4. Sekar Hadiyanti Pratiwi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI